

# Paradiplomasi dalam Isu Kesetaraan Gender: Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers WPF Melalui Program Power to Youth (PtY) 2021-2023

*Paradiplomacy in Gender Equality Issues: Collaboration between Jember Regency Government and Rutgers WPF through The Power to Youth (PtY) Program 2021-2023*

Khurin Kedhaton\*, Muhammad Fadzryl Adzmy\*\*

\*, \*\*Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

Email: \* khurinkedhaton2020149@webmail.umm.ac.id , \*\* muhammadfadzryl@umm.ac.id

---

## Riwayat Artikel

Diterima: 4 Februari 2024  
Direvisi: 27 Maret 2024  
Disetujui: 29 April 2024

doi: 10.22212/jp.v15i1.4358

## Abstract

*The gender inequality situation in Jember Regency from 2018 to 2022 had not significantly improved. The Jember Regency government has collaborated with Rutgers WPF, a non-profit organization from the Netherlands, to promote gender equality and reproductive health through the Power to Youth (PtY) program for five years until 2025. This collaboration is categorized as second-layers paradiplomacy, which focuses on cooperation in the social and health sectors. Using qualitative research methods and descriptive analysis, the author found that in the researched case studies, paradiplomacy through the collaborative program ran effectively in addressing gender inequality issues in Jember. The findings indicate that the paradiplomacy process between the Jember Regency Government and Rutgers WPF is relatively simple. Furthermore, the findings also demonstrate that paradiplomacy can be a good way to address social issues at the local level, and non-governmental international organizations can be effective partners in paradiplomacy.*

**Keywords:** Paradiplomacy, Jember Regency; Rutgers Indonesia; Gender Equality; Power to Youth (PtY)

## Abstrak

Kondisi ketimpangan gender di Kabupaten Jember dari tahun 2018 hingga 2022 belum membaik secara signifikan. Pemerintah Kabupaten Jember melakukan kerja sama dengan Rutgers WPF, sebuah lembaga non-profit asal Belanda dalam mendorong kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi melalui program Power to Youth (PtY) selama lima tahun hingga tahun 2025. Kerja sama ini dikategorikan sebagai paradiplomasi pada lapis kedua yang berfokus pada kerja sama di bidang sosial dan kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis deskriptif analisis, penulis menemukan pada studi kasus yang diteliti, paradiplomasi melalui program yang dikerjasamakan berjalan dengan baik dan efektif membantu permasalahan ketimpangan gender di Jember. Penemuan menunjukkan proses paradiplomasi antara Pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers WPF cukup sederhana. Di samping itu, temuan juga memperlihatkan paradiplomasi dapat menjadi cara yang baik dalam membantu mengatasi masalah ketimpangan gender di daerah dan organisasi internasional non-pemerintah dapat menjadi partner yang efektif dalam paradiplomasi.

**Kata Kunci:** Paradiplomasi; Kabupaten Jember; Rutgers Indonesia; Kesetaraan Gender; Power to Youth (PtY)

## Pendahuluan

Permasalahan kesetaraan gender dewasa ini menjadi sebuah permasalahan yang serius, terutama terjadi di negara-negara berkembang. Klaim positif bahwa hari ini terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran kaum perempuan (yang kerap kali menjadi objek ketimpangan dan kekerasan gender) terkait isu-isu ini nyatanya belum mampu secara signifikan meningkatkan kualitas kesetaraan. Terlebih, hadirnya perubahan sosial besar-besaran “yang tak terduga” pasca *covid-19* yang kemudian menunjukkan kepada kita bahwa masih ada ruang-ruang tantangan tak terpetakan sebelumnya pada upaya pembangunan kesetaraan gender di negara-negara berkembang<sup>1</sup>, tak terkecuali Indonesia. Penelitian ini kemudian secara spesifik ingin mengeksplorasi upaya-upaya dalam peningkatan kualitas kesetaraan gender pasca *covid-19*, dengan menggunakan kacamata aktivitas paradiplomasi dan mengambil studi kasus di Kabupaten Jember, Indonesia.

Negara-Negara berkembang seperti Indonesia, dengan karakter pembangunannya yang sangat khas menunjukkan gejala-gejala yang juga sangat khas dalam masalah kesetaraan gender. Praktik pembangunan serta kaitannya dengan banyak hal dalam masyarakat seperti ekonomi, sosial, kelas pekerja, moral dan lain-lain mampu menciptakan banyaknya potensi permasalahan pada isu kesetaraan gender.<sup>2</sup> Kontrak kerja, hak hukum, dan perlindungan sosial<sup>3</sup> misalnya, merupakan sedikit dari beberapa ruang besar dimana isu ketimpangan gender (utamanya terjadi pada perempuan)

dapat atau bahkan selalu terjadi. Isu-isu lain seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, pernikahan dini, dan kekurangan gizi pun juga menjadi sebagian masalah utama lainnya di negara berkembang.<sup>4</sup>

Pandemi *Covid-19*, di mana belakangan ini menjadi diskursus besar dalam perubahan fenomena ekonomi, sosial masyarakat dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipungkiri memberikan kemunduran dan tantangan baru yang cukup besar bagi upaya pembangunan kesetaraan gender, khususnya di negara berkembang.<sup>5</sup> Adaptasi akan dampak dari hal ini merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan oleh negara, masyarakat sipil dan aktor-aktor terkait yang fokus pada isu kesetaraan gender untuk mencegah kemunduran yang lebih dalam. Disaat berbagai macam upaya dilakukan untuk mengatasi ketimpangan gender, bencana mendunia seperti *Covid-19* tidak saja kemudian menjadi faktor penghambat keberhasilan upaya-upaya sebelumnya, namun juga dapat menuntun kita untuk melihat lebih dalam bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini punya keterbatasan dan butuh dieksplorasi lebih luas.

Selama ini, berbagai macam upaya telah dilakukan untuk mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender di negara berkembang, misalnya dengan mempromosikan dan pengadopsian prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam SDG's, program pelibatan perempuan dalam setiap dimensi pembangunan, pendidikan, perbaikan sistem kerja, hingga yang terbaru melalui penggunaan *Artificial Intelligence (AI)*. Semuanya nampak memiliki

- 1 Olga Rudic, “The Advancement of Gender Equality Policies in Developing Countries on the Background of Current Global Challenge.” 2, no. 163 (2023): 255-60.
- 2 Nur Afni, Mohammad Rezal, dan Labandingi Latoki, “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 1 (2022): 19-48.
- 3 Tolulope Olarewaju dan Julia Fernando, “Gender Inequality and Female Entrepreneurship in Developing Countries,” *Decent Work and Economic Growth*, (Mei 2020): 1-9.

- 4 Rudic, “The Advancement of Gender Equality Policies in Developing Countries on the Background of Current Global Challenge,” 255-60.
- 5 E.A. Mosakova, “Era of Covid-19: How the Pandemic Affected Gender Inequality and Fertility (on the Example of BRICS),” *RUDN JOURNAL OF SOCIOLOGY* 23, no. 2 (2023): 284 - 293; Ahmad Khan dan Melanie M. Tidman, “Gender Inequality in Developing Countries: A Multifactorial Review,” *Journal of Social and Political Sciences* 6, no. 1 (2023): 151-62.

kemajuan, hingga kemudian wabah dan pandemi merubah banyak alur dan fokus dunia.<sup>6</sup>

Berbicara spesifik Indonesia, kasus ketimpangan gender sendiri berada pada tingkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2021 misalnya, pengukuran dari *Gender Inequality Index* (GII) menunjukkan Indonesia berada pada posisi ke 4 setelah Myanmar, Laos, Kamboja untuk angka ketimpangan gender tertinggi di Asia Tenggara. Selanjutnya, di tahun 2022, di level dunia ketimpangan gender di Indonesia menduduki peringkat ke-110 dari 170 negara.<sup>7</sup> Catatan tersebut dalam banyak penelitian<sup>8 9</sup> setidaknya telah diperparah oleh pandemi *Covid-19* yang kemudian semakin memperdalam jurang ketimpangan gender di Indonesia. Dalam sebuah penelitian diungkapkan bahwa salah satu faktanya merujuk pada perempuan yang lebih banyak dan mudah kehilangan pekerjaan daripada laki-laki.<sup>10</sup>

Di samping itu, selama pandemi terjadi peningkatan pernikahan anak terutama di desa yang disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang memburuk selama pandemi. Anak perempuan dinilai kebanyakan menjadi korban dalam pernikahan anak selama pandemi.<sup>11</sup> Penelitian lain juga menyebut

pernikahan anak di Indonesia selama pandemi *Covid-19* disebabkan oleh perubahan pola belajar, kepercayaan agama, kebiasaan keluarga, dan pengaruh teman sebaya.<sup>12</sup> Lonjakan pernikahan anak yang terjadi akibat *Covid-19* pada akhirnya menimbulkan tantangan lain yang harus dihadapi pasca pandemi seperti peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan masalah kesehatan reproduksi.

Masalah ketimpangan gender terjadi diberbagai daerah di Indonesia, setiap daerah memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda-beda, salah satunya di Kabupaten Jember. Dalam mengukur tingkat ketimpangan gender, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan perhitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Perhitungan IKG digunakan untuk mengukur *loss* dalam pembangunan manusia yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan gender.<sup>13</sup> Hal tersebut memiliki artian semakin kecil skor IKG maka semakin baik pula kondisi kesetaraan gender, serta pembangunan manusia dapat dinilai berhasil. Merujuk data BPS pada tahun 2022, skor IKG di Kabupaten Jember berada pada skor 0,488. IKG tersebut, dipengaruhi oleh tingkat kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perempuan.<sup>14</sup>

Dalam menangani kasus ketimpangan gender, pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan berbagai upaya seperti pembuatan kebijakan dan program Desa Layak Anak (DLA) yang bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan usia anak.<sup>15</sup> Selain itu,

6 Samera, A., Khalil, "Addressing Gender Inequalities with AI-Driven Policies in Developing Countries", (2023).

7 Badan Pusat Statistik, *Kajian Perhitungan Indeks Ketimpangan Gender 2022*, (BPS RI, 2022), 3.

8 Nala Nourma Nastiti dan I Wayan Aditya Harikesa, "Fenomena Penyebaran Pandemi Covid 19 Dan Kesenjangan Gender Di Asia Tenggara (Studi Kasus: Dampak Covid 19 Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia (2020-2021))", *Jurnal Dinamika Global* 8, no. 01 (2023): 109.

9 Daniel Halim, Sean Hambali, dan Ririn Salwa Purnamasari, "Not All That It Seems: Narrowing of Gender Gaps in Employment during the Onset of COVID-19 in Indonesia," 2023.

10 Nastiti dan Harikesa, "Fenomena Penyebaran Pandemi Covid 19 Dan Kesenjangan Gender Di Asia Tenggara (Studi Kasus: Dampak Covid 19 Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia (2020-2021))", 117.

11 Chr. Argo Widiarto, Farikha Wahyu Lestari, dan Suhendri Suhendri, "Edukasi Tentang Pernikahan Dini Dari Perspektif Psikososial, Budaya Dan Kesehatan

Reproduksi," *Altruis: Journal of Community Services* 3, no. 3 (2022): 60-63.

12 Anju Nofarof Hasudungan, "Increasing Child Marriage in Indonesia during the Covid-19 Pandemic: What Causes It?" 2, no. 2 (2022): 151-61.

13 Badan Pusat Statistik, *Kajian Perhitungan Indeks*, 6.

14 BPS Provinsi Jawa Timur, "Indeks Ketimpangan Gender (IKG), 2018-2022," 2023, diakses 20 Januari 2024, <https://jatim.bps.go.id/indicator/40/607/1/indeks-ketimpangan-gender-ikg.html>.

15 Liputan6. 2022. "Urus Pemkab Jember Cegah Pernikahan Dini Hingga Eksploitasi Anak." *Liputan6*, 22 Maret 2022, diakses 20 Januari 2024, <https://www.liputan6.com/jatim/read/4918526/jurus-pemkab-jember-cegah-pernikahan-dini-hingga-eksploitasi-anak>.

terdapat badan pemerintah DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) yang berperan dalam membentuk program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu kesetaraan gender, serta dampak dari dinamika hubungan internasional, peran *stakeholders* selain negara sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, terutama dalam isu sosial.<sup>16</sup> Isu yang berhubungan dengan kesetaraan gender seperti pencegahan perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan dapat menjadi alat perekat bagi negara dan aktor kepentingan lain untuk berkolaborasi mengatasi isu-isu tersebut.

Dalam upaya mengatasi masalah ketidaksetaraan gender di era globalisasi yang memperluas ruang eksplorasi, cara-cara baru merupakan sebuah keniscayaan. Salah satu cara inovasi yang juga dilahirkan dari adanya globalisasi yaitu praktik “Paradiplomasi”. Hal tersebut dibuktikan dengan Penelitian Musawar dkk (2022) yang menyoroti upaya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mencegah perkawinan anak dengan cara peningkatan pendidikan melalui kerja sama luar negeri dengan Kujawsko-Pomorskie, Polandia.<sup>17</sup> Pada studi kasus dalam penelitian ini, pemerintah Kabupaten Jember tidak melakukan paradiplomasi dengan pemerintah daerah asing, melainkan dengan organisasi internasional yaitu Rutgers WPF dalam mendorong kesetaraan gender di Jember. Hal yang kemudian menjadi menarik untuk dikaji adalah melihat bahwa selama ini kajian

paradiplomasi pada bidang pembangunan kesetaraan gender terutama jika mitranya adalah lembaga organisasi internasional belum pernah dibahas sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini ingin memperlihatkan ruang lingkup paradiplomasi yang luas, tidak hanya terbatas pada kerja sama antara pemerintah daerah dengan daerah asing di luar negeri. Selama ini, kajian paradiplomasi khususnya di Indonesia banyak meneliti tentang kerja sama antar daerah dengan daerah asing pada bidang ekonomi, investasi, pariwisata, budaya, teknologi dan pendidikan.<sup>18</sup> Masih sedikit penelitian yang menunjukkan aktivitas paradiplomasi pada bidang sosial terkait kesetaraan gender terutama jika partner dalam paradiplomasi tersebut merupakan organisasi internasional non-pemerintah.<sup>19</sup>

Paradiplomasi Kabupaten Jember pada penelitian ini, merupakan bentuk Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) dengan Rutgers Indonesia yang merupakan mediator dari Rutgers International yang berpusat di Belanda. Paradiplomasi yang dilakukan berfokus pada pencegahan perkawinan anak, kehamilan remaja, serta kekerasan berbasis gender dan seksual di dua kecamatan dan empat desa yang ada di Jember. Kerja sama tersebut diimplementasikan melalui program *Power to Youth* yang juga bermitra dengan Yayasan Tanoker Ledokombo dan media RRI yang ada di Jember. Program *Power to Youth* dilaksanakan selama lima tahun (2021-2025) melalui strategi edukasi dengan 4 jalur (*pathways*) sasaran perubahan yaitu kaum muda (12-24 Tahun), Organisasi Masyarakat Sipil, aktor sosial, dan aktor negara.<sup>20</sup>

16 Andi Nur Fiqhi Utami dan Asma Amin, “Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju,” *Journal of Government and Politics (JGOP)* 5, no. 1 (Juli 2023): 70-74.

17 Musawar dkk., “Prevent Child Marriage by Improving Education in West Nusa Tenggara Through Sister Province Relations with Kujawsko-Pomorskie, Poland” 6, no. 1 (2022): 36-55.

18 Tonny Dian Effendi, “Ideational Factors in the Paradiplomacy Activities of Indonesian Cities,” *Journal of Global and Area Studies* 6, no. 3 (2022): 241-68.

19

20 Project Manager PtY Tanoker. 2023. Wawancara oleh penulis. Jember. 18 Desember 2023.

## Permasalahan

IKG Kabupaten Jember berdasarkan data BPS masih tinggi. Perempuan khususnya Remaja Perempuan dan Perempuan Muda (RPPM) merupakan kelompok rentan yang apabila tidak mendapatkan perhatian dan perlindungan, dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti ketimpangan gender, perceraian, stunting, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan lain-lain. Dalam menyikapi masalah tersebut, pemerintah Kabupaten Jember melakukan berbagai upaya, salah satunya melakukan paradiplomasi dengan INGOs yakni Rutgers WPF Indonesia. Melalui program *Power to Youth*, Pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers WPF Indonesia berusaha mengoptimalkan penanganan ketimpangan gender melalui strategi edukasi 4 jalur. Studi kasus di Kabupaten Jember memperlihatkan potensi paradiplomasi sebagai perangkat dalam membantu pemerintah daerah mengatasi ketimpangan gender yang terjadi. Dengan demikian, hal yang menarik untuk dianalisa dan diteliti adalah apakah implementasi paradiplomasi melalui program *Power to Youth* antara Pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers WPF efektif dalam mendorong kesetaraan gender di Jember tahun 2021-2023.

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana implementasi kerja sama yang dilakukan oleh Kabupaten Jember dan Rutgers WPF Indonesia dalam mendorong kesetaraan gender dalam ruang lingkup paradiplomasi. Peneliti juga akan mengkaji efektivitas program *Power to Youth* yang dikerjasamakan dalam mendukung RPPM di Kabupaten Jember. Tujuan lain dari penelitian ini adalah agar dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah lain untuk pembangunan daerah melalui kerja sama internasional.

## Kerangka Teori

### *Paradiplomasi*

Globalisasi telah menimbulkan hubungan yang saling ketergantungan secara global ditandai dengan pergerakan ide-ide, benda, dan orang dalam skala besar melintasi batas-batas kedaulatan. Hubungan ini lahir akibat adanya kemajuan teknologi, komunikasi, perdagangan dan perjalanan yang menciptakan kesadaran bersama.<sup>21</sup> Globalisasi telah mendorong adanya integrasi ekonomi dan keterlibatan politik dalam ranah Hubungan Internasional. Dalam mendorong pembangunan nasional sebuah negara melakukan investasi di wilayah-wilayah baru yang lebih menjanjikan secara ekonomi. Praktiknya adalah kerja sama internasional dalam bidang ekonomi, pengembangan IPTEK, pembangunan dan masih banyak lagi. Sehubungan dengan interaksi kerja sama luar negeri yang didorong oleh globalisasi tersebut, menjadikan negara bukan lagi satu-satunya aktor yang memainkan hubungan luar negeri dan melahirkan fenomena baru yang disebut "Paradiplomasi".<sup>22</sup> Paradiplomasi merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan fenomena kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh sub-state atau pemerintah daerah dengan pihak asing.

Merujuk pada penjelasan Mukti bahwa dalam kasus Negara Kesatuan Republik Indonesia, paradiplomasi merupakan upaya entitas non-negara, seperti kota atau daerah, untuk terlibat dalam hubungan internasional secara langsung sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat.<sup>23</sup> Selanjutnya, tokoh Kuznetsov menjelaskan mengenai 11 dimensi paradiplomasi yang dimana pada dimensi ke-4 menjelaskan paradiplomasi

21 Richard W Mansbach dan Kirsten L Rafferty, *Pengantar Politik Global* (Penerbit Nusa Media, 2012), 888-889.

22 Ignatius Hubert dan Windy Dermawan, "West Jakarta Government's Paradiplomacy towards Global Public in Kalideres Refugee Issues," *Society* 8, no. 2 (2020): 567-80.

23 Takdir Ali Mukti, *Politik Paradiplomasi Dan Isu Kedaulatan Di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2020), 1-10.

dalam dimensi *International Relations* (IR). Dimensi Hubungan Internasional menurut Alexander S. Kuznetsov mengacu pada aspek paradiplomasi yang melibatkan interaksi, negosiasi, dan keterlibatan antara entitas sub-nasional dan aktor di panggung internasional. Dimensi ini berfokus pada bagaimana pemerintah sub-nasional, seperti negara bagian, provinsi, atau kota, membangun dan mengelola hubungan dengan pemerintah asing, organisasi internasional, dan entitas sub-nasional lainnya dari berbagai negara.<sup>24</sup>

Dalam dimensi ini, entitas sub-nasional dapat mengejar kepentingan mereka, mempromosikan pembangunan ekonomi daerah mereka, menarik investasi asing, memajukan pertukaran budaya, menangani isu-isu lingkungan, atau berpartisipasi dalam inisiatif tata kelola global.<sup>25</sup> Sehingga hal ini menunjukkan adanya potensi paradiplomasi sebagai instrumen pembangunan. Di sisi lain, implementasi paradiplomasi dapat dikelompokkan berdasarkan fenomena yang terjadi seperti yang disebutkan Tavares yakni *single-themed paradiplomacy*, *ceremonial paradiplomacy*, *global paradiplomacy*, dan *sovereignty paradiplomacy*. Fenomena global *paradiplomacy* yang dimaksud oleh Rodrigo Tavares menyoroti sifat *multi-level diplomasi*, di mana aktor subnasional berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Ini termasuk membentuk kemitraan dengan wilayah, kota, atau provinsi lain di lintas batas, serta berkolaborasi dengan organisasi internasional dalam isu global.<sup>26</sup>

Implementasi paradiplomasi yang dilakukan di Indonesia secara umum bertujuan untuk meningkatkan perekonomian

daerah dan membantu program-program pemerintah di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan dan pariwisata.<sup>27</sup> Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah di Indonesia dapat berkolaborasi dengan aktor-aktor internasional selain sub-state seperti organisasi internasional dalam bidang sosial yang menyoroti pengembangan masyarakat, perlindungan, dan promosi hak asasi manusia. Kembali lagi pada penjelasan Rodrigo Tavares mengenai alasan pemerintah daerah melakukan praktik paradiplomasi atas dasar meningkatkan layanan masyarakat seperti menggandeng organisasi internasional atau aktor internasional lainnya dalam meningkatkan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, atau pengembangan infrastruktur.<sup>28</sup> Secara keseluruhan, pemerintah daerah terlibat dalam paradiplomasi untuk memanfaatkan kemitraan, sumber daya, dan keahlian internasional untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, mempromosikan pembangunan sosial-ekonomi, mengatasi isu global dan meningkatkan kesejahteraan warga mereka.

### *Kesetaraan Gender*

Kesetaraan Gender merupakan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi, pengambilan keputusan, keterlibatan dan memperoleh kesempatan yang sama serta dapat merasakan kesejahteraan dan manfaat dari pembangunan bersama.<sup>29</sup> UNICEF mendefinisikan kesetaraan gender sebagai konsep bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan peluang dan perlakuan yang sama dalam mewujudkan potensi mereka, martabat dan hak asasi manusia, serta dapat berkontribusi pada bidang ekonomi, sosial,

24 Alexander S. Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs* (London ; New York, NY: Routledge, 2015), 68-75.

25 Kuznetsov, 68-75.

26 Rodrigo Tavares, *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players* (New York: Oxford University Press, 2016) 29-37.

27 Mukti, *Politik Paradiplomasi Dan Isu Kedaulatan Di Indonesia*, 49.

28 Tavares, *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*, 40-47.

29 Fahmi Irfani, "Konstektualisasi Gender Islam Dan Budaya," *Buletin Al-Turas* 16, no. 1 (2018): 200-216.

budaya dan politik.<sup>30</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender adalah kondisi di mana baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama untuk melakukan peran dan partisipasi diberbagai bidang seperti sosial budaya, politik, ekonomi dan bidang lainnya.

Berdasarkan laporan BPS di tahun 2022 IKG di Indonesia menunjukkan belum optimalnya upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender. Ketimpangan gender merujuk pada perbedaan perlakuan, hak, atau akses yang didasarkan pada jenis kelamin, di mana salah satu jenis kelamin diuntungkan atau merugi dibandingkan dengan yang lain. Ini bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya. Ketimpangan gender terjadi akibat budaya patriarki, kontruksi sosial dan juga dapat difaktori oleh pendidikan.<sup>31</sup> Ketimpangan gender yang diciptakan oleh budaya patriarki dan kontruksi sosial yang ada di masyarakat ini yang kemudian menyebabkan kekerasan dan diskriminasi khususnya pada perempuan sebagai kelompok rentan.<sup>32</sup>

Kesetaraan gender penting untuk diwujudkan karena membawa berbagai manfaat bagi individu, masyarakat, dan pembangunan secara keseluruhan. Sebagai contoh pentingnya kesetaraan gender dalam aspek diplomasi, dapat memperkuat diplomasi dengan memastikan representasi yang lebih adil dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan, serta memperluas jaringan diplomatik

dengan mencakup berbagai perspektif dan pengalaman. Ketidaksetaraan gender dapat berdampak buruk pada pengembangan kebijakan yang menjadi bias gender.<sup>33</sup>

## Metode Penelitian

Penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, dengan jenis penelitian deskriptif analisis dalam memaparkan permasalahan atau fenomena yang diamati. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis implementasi kerja sama paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers WPF Indonesia dalam mendorong kesetaraan gender melalui program *Power to Youth*. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur yang kemudian dibedakan menjadi dua yakni data primer dan juga sekunder.

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan pertanyaan campuran (wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur). Wawancara pertama dilakukan bersama dengan Bappeda Kabupaten Jember pada tanggal 30 November 2023 terkait kerja sama daerah Kabupaten Jember dengan organisasi internasional Rutgers WPF. Selanjutnya, wawancara kedua dilakukan dengan Yayasan Tanoker Ledokombo pada tanggal 18 Desember 2023 yang membahas lebih jauh tentang implementasi dan tantangan program *Power to Youth* di Kabupaten Jember. Terakhir, wawancara dengan Badan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Jember pada tanggal 21 Desember 2023 mengenai paradiplomasi Kabupaten Jember. Selanjutnya, data sekunder dalam penelitian ini berasal dari sumber yang telah ada seperti publikasi pemerintah, website, dokumen atau laporan yang terkait dengan kerja sama Kabupaten Jember dengan Rutgers WPF Indonesia dalam program *Power to Youth*.

<sup>33</sup> Jennifer A. Cassidy, *Gender and Diplomacy*, (Routledge New Diplomacy Studies, 2017).

<sup>30</sup> UNICEF, "Glossary Of Terms And Concepts," UNICEF Regional Office for South Asia (November 2017): 537-58.

<sup>31</sup> Lestari Aguslim, Sulistiyowati, dan Shifa Nur Amalia, *Gender Dan Pembangunan Ekonomi: Studi Lintas Provinsi Di Indonesia*, (Madza Media, 2023), 15-16.

<sup>32</sup> Dinny Rahmayanty dkk., "Ketidaksetaraan Gender Dalam Sistem Patrilineal," *Natalia Putri INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 6513-22.

Selain itu, data sekunder dari penelitian ini berupa buku, jurnal dan Peraturan Pemerintah terkait Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Luar Negeri. Berbagai data terkait fenomena yang diteliti dikelola dengan menggunakan konsep yang mendukung penelitian ini untuk menghasilkan kesimpulan.

## **Ketidaksetaraan Gender dan Dampaknya**

### *Fenomena Ketimpangan Gender di Indonesia*

Ketimpangan gender di Indonesia kerap dikaitkan dengan pendidikan, kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan partisipasi perempuan pada bidang politik dan ekonomi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 mendefinisikan kesetaraan gender sebagai kesamaan hak dan kesempatan yang didapatkan oleh laki-laki maupun perempuan sebagai manusia, memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi di bidang sosial budaya, ekonomi, politik dan dalam menikmati hasil pembangunan. *United Nations Population Fund* (UNFPA) menyebut tujuan dari kesetaraan gender adalah terciptanya kondisi masyarakat yang adil dimana perempuan dan laki-laki dapat menikmati kesempatan, hak dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan.<sup>34</sup> Oleh sebab itu, kesetaraan gender sangat penting bagi realisasi hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Seiring dengan berjalannya waktu, ketimpangan gender di Indonesia mengalami kondisi yang membaik namun masih cukup tinggi. Data dari BPS memperlihatkan IKG Indonesia sejak tahun 2018 hingga 2022 mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 sebesar 0,499, pada 2019 sebesar 0,488 dan terus mengalami perbaikan hingga

mencapai 0,459 di tahun 2022.<sup>35</sup> Ketimpangan gender di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor yang kompleks dan saling terkait. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor kultural seperti budaya patriarki yang masih kuat di beberapa wilayah di Indonesia, akses terhadap pendidikan, partisipasi perempuan dalam pasar kerja dan keterwakilan dalam politik, serta kesehatan reproduksi.

Apabila merujuk pada BPS, perbaikan pada nilai IKG dipengaruhi oleh perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi yang berhubungan dengan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). BPS menghitung Indeks Ketimpangan Gender melalui indikator proporsi perempuan yang kawin di usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak pada fasilitas kesehatan. Tercatat perbaikan nilai IKG di Indonesia pada tahun 2022 didukung oleh perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi. Pada dimensi tersebut, presentase perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan mengalami penurunan dari 15,4 persen pada tahun 2021 menjadi 14,0 persen di tahun 2022.<sup>36</sup> Kesehatan reproduksi berhubungan erat dengan kesetaraan gender karena akses dan kontrol terhadap kesehatan reproduksi sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan gender.

Kesetaraan gender memastikan laki-laki dan perempuan mendapatkan informasi, layanan dan perlindungan kesehatan reproduksi yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi. Hal ini sejalan dengan salah satu target yang ditetapkan oleh SDGs pada misi ke-5 *Gender Equality*, dalam menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan

34 UNFPA, "Frequently Asked Questions about Gender Equality," United Nations Population Fund, 2024, diakses 19 Maret 2024, [https://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about-gender-equality#:~:text=Achieving gender equality requires women's,in productive and reproductive life.](https://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about-gender-equality#:~:text=Achieving%20gender%20equality%20requires%20women%27s,in%20productive%20and%20reproductive%20life.)

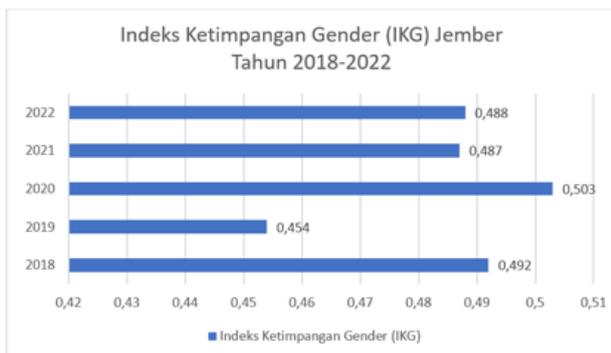
35 BPS, "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2022," Badan Pusat Statistik, 1 Agustus 2023, diakses 20 Januari 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/08/01/2042/indeks-ketimpangan-gender-ikg-2022.html>

36 BPS, "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2022."

reproduksi. Indikator pada target Misi ke-5 SDGs tersebut yaitu proporsi perempuan berusia 15-49 tahun mengambil keputusan berdasarkan informasi mengenai hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.<sup>37</sup> Dengan demikian, penting untuk mencapai kesehatan reproduksi yang optimal bagi semua individu, serta untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif di mana hak-hak reproduksi dan kesehatan dihormati dan dilindungi untuk semua orang, tanpa memandang gender atau jenis kelamin.

### *Fenomena Ketimpangan Gender di Kabupaten Jember*

Berdasarkan laporan BPS Provinsi Jawa Timur, IKG Kabupaten Jember pada tahun 2022 menduduki peringkat ke-8 tertinggi se Jawa Timur. Pada tahun 2018 hingga 2022 IKG Kabupaten Jember mengalami kondisi yang berubah-ubah. Grafik di bawah ini memperlihatkan angka IKG di Jember yang mengalami kondisi naik turun di setiap tahun.<sup>38</sup> Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Jember harus menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian lebih dalam mengatasi ketimpangan gender.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (2023)

**Gambar 1:** Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Jember Tahun 2018-2022

37 UN, "Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls," United Nations, 2024, diakses 15 Januari 2024, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>.

38 BPS Provinsi Jawa Timur, "Indeks Ketimpangan Gender (IKG), 2018-2022."

Tercatat bahwa kasus ketimpangan gender yang terjadi di Kabupaten Jember tak lepas dari problem kultural yang ada di masyarakat. Budaya patriarki masih melekat di kebanyakan masyarakat Jember. Rahmayanty dkk menjelaskan masyarakat patriarki merupakan masyarakat yang memiliki ideologi yang menyakini bahwa laki-laki memiliki kendali atas kehidupan dan bersifat otoriter. Akibatnya, perempuan sering menjadi korban pelecehan dan dipandang rendah.<sup>39</sup> Budaya ini kemudian memunculkan gap antara perempuan dan laki-laki terutama dalam akses pada kesehatan reproduksi. Selain itu, terdapat budaya berupa kepercayaan yang ada di masyarakat juga mempengaruhi ketimpangan gender di Jember.

Sebagian masyarakat Jember masih menjadikan norma budaya dan agama sebagai alasan untuk melakukan praktik pernikahan usia anak. Adanya kepercayaan masyarakat seperti "Pamali" jika menolak lamaran dari seseorang nantinya akan kesulitan untuk menikah. Selain itu, pendidikan orang tua juga memiliki pengaruh seperti pola dalam mengasuh anak. Berbagai persoalan tersebut terjadi akibat beberapa faktor seperti minimnya akses terhadap pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dan kesetaraan gender. Tokoh-tokoh masyarakat yang posesif dan memiliki keyakinan yang tidak sama, seperti pemahaman nikah muda yang bertabrakan dengan Undang-Undang tentang pernikahan anak juga turut menjadi tantangan tersendiri.<sup>40</sup> Kesehatan reproduksi dan pernikahan anak memiliki hubungan yang kompleks. Pernikahan anak dapat berdampak negatif pada kesehatan reproduksi, karena anak yang menikah pada usia yang terlalu muda cenderung memiliki risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, seperti kehamilan

39 Rahmayanty dkk., "Ketidaksetaraan Gender Dalam Sistem Patrilineal," 6513-6522.

40 Project Manager PtY Tanoker. 2023. Wawancara oleh penulis. Jember. 18 Desember 2023.

remaja yang tidak diinginkan, kesehatan bayi yang buruk, dan risiko komplikasi saat melahirkan.<sup>41</sup>

Merujuk pada studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia dan KIT *Royal Tropical Institute*, terdapat 748 kasus pernikahan anak perempuan di Jember pada tahun 2019. Pada tahun 2020, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 664 yang kemungkinan disebabkan oleh adanya revisi pada UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 yang membatasi usia minimal menikah yakni 19 tahun.<sup>42</sup> Siring berjalannya waktu, tingkat pernikahan anak di Jember pada tahun 2020, berada di ranking 2 nasional dengan 1.451 kasus dispensasi perkawinan usia anak yang disetujui.<sup>43</sup> Kemudian di tahun 2023, perkawinan usia anak masih kerap terjadi dengan 903 kasus dispensasi nikah di Kabupaten Jember per Agustus. Angka tersebut berpotensi mengalami peningkatan dan menjadi kasus paling tinggi di Jawa Timur.<sup>44</sup>

Penyebab terjadinya perkawinan anak di Jember diakibatkan oleh perjuduhan baik oleh orang tua, aktor agama, kondisi perekonomian keluarga, kehamilan yang tak

diinginkan, takut melakukan perzinahan, dan dampak negatif penggunaan internet.<sup>45</sup> Selain itu, pernikahan anak khususnya pada anak perempuan di Jember juga dapat terjadi akibat pandangan orang tua bahwa anak perempuan tidak perlu melanjutkan pendidikan tinggi dan sebaiknya segera menikah. Tidak lepas dari pandangan masyarakat yang percaya perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi atau setara dengan laki-laki karena beranggapan perempuan akan menjadi istri dan hanya mengurus urusan domestik. Pada bidang pendidikan, perempuan sering dinomor duakan dalam mendapatkan akses pendidikan. Natasha dan Harum juga menyebut, akibat ketidakmampuan ekonomi, orang tua yang memiliki anak perempuan dan laki-laki akan mendahulukan anak laki-lakinya untuk menempuh pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, sementara anak perempuan akan segera dinikahkan untuk meringankan masalah ekonomi keluarga.<sup>46</sup>

Kasus pernikahan anak di Jember juga difaktori oleh kurangnya pengetahuan generasi muda tentang kesehatan seksual dan reproduksi. HKSR masih menjadi pembahasan yang cukup sensitif di kalangan masyarakat Jember. Sebagian masyarakat masih menganggap pembahasan HKSR merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan dan tidak wajar untuk dibicarakan di ruang publik. Pembahasan mengenai HKSR di kalangan kaum muda juga cenderung masih terabaikan dikarenakan kaum muda dipandang belum cukup usia atau pantas untuk mendiskusikan HKSR. Padahal, dampak yang dapat ditimbulkan dari ketidaktahuan kaum muda terkait HKSR adalah tingginya kasus pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, HIV-AIDS

41 Zefanya Angellin Chen, Vanessa Vanessa, dan Felicia Amanda Sulistio, "Case Studies on Marriage for Children Who Have Not Reached the Age Limit," *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2023): 1167-74.

42 University of Indonesia Center for Gender dan Sexuality Studies and KIT Royal Tropical Institute, "Power To You ( Th ) - Indonesia Young People ' S Perspectives and Decision Making Regarding Harmful Practices , Violence Against Women," (2021): 27.

43 Sri Wahyunik dan Arie Noer Rachmawati, "Tingginya Perkawinan Anak Jadi Faktor Jember 'Pilot Project' Power to Youth, Bakal Berjalan 5 Tahun," *TribunJember*, 12 Oktober 2022, diakses 22 Januari 2024, <https://jatim.tribunnews.com/2022/10/12/tingginya-perkawinan-anak-jadi-faktor-jember-pilot-project-power-to-youth-bakal-berjalan-5-tahun>.

44 Radar Digital, "Perda KLA Disahkan Juni Lalu, Hingga Kini Belum Ada Aturan Turunan Untuk Cegah PUA Di Jember," *Radar Jember*, 25 Oktober 2023, diakses 22 Januari 2024 <https://radarjember.jawapos.com/jember/793108813/perda-kla-disahkan-juni-lalu-hingga-kini-belum-ada-aturan-turunan-untuk-cegah-pua-di-jember>.

45 University of Indonesia Center for Gender dan Sexuality Studies and KIT Royal Tropical Institute, "Power To You ( Th ) - Indonesia," 27-29.

46 Harum Natasha, "Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak, Dan Solusi." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 12 (2013): 53.

dan masih banyak lagi.<sup>47</sup>

Pernikahan anak dapat berdampak negatif pada kesehatan reproduksi, karena anak yang menikah pada usia yang terlalu muda cenderung memiliki risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, seperti kehamilan remaja yang tidak diinginkan, kesehatan bayi yang buruk, dan risiko komplikasi saat melahirkan. Oleh karena itu, membatasi pernikahan anak dan memastikan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat secara keseluruhan. Kondisi yang demikian terjadi menunjukkan upaya pemerintah yang belum optimal dalam menangani isu ketimpangan gender bahkan regulasi mengenai batasan usia pernikahan belum cukup untuk mengatasi kasus yang terjadi.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif selain melalui kebijakan publik, pemerintah perlu melakukan upaya dalam perubahan sosial dan budaya, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi khusus pada perempuan. Langkah-langkah tersebut perlu didukung oleh kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat di Jember mengenai kesehatan reproduksi, dampak negatif pernikahan anak, dan budaya patriarki yang masih mendiskriminasi perempuan merupakan hal yang perlu diatasi oleh program *Power to Youth*. Program tersebut merupakan realisasi kerja sama Pemerintah Kabupaten Jember dengan Rutgers WPF yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, mendorong pemberdayaan perempuan, dan mengurangi stigma yang terkait dengan topik-topik seperti seksualitas

47 Indriyati Suparno dan Rahayu Purwaningsih, Modul Serial Pendidikan Gender, Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Orang Muda-Untuk Pusat Layanan Komunitas (PLK) (Yayasan SAPA (SAPA Institut), 2022), 5.

remaja untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mendukung bagi pemuda untuk berbicara tentang isu-isu tersebut.

## Praktik Paradiplomasi

### *Praktik Paradiplomasi Kabupaten Jember*

Praktik paradiplomasi di Indonesia cukup banyak dilakukan oleh beberapa daerah yang ada di Jawa Timur salah satunya Kabupaten Jember. Rodrigo Tavares menyebut alasan sub-state melakukan paradiplomasi terjadi karena beberapa alasan yakni: *seize global opportunities, provide citizen services, promote decentralization, personal interests, electoral opportunism, address local claims, cultural distinctiveness and nationalism, diaspora, geography, dan overcome isolationism*.<sup>48</sup> Pada dasarnya, alasan pemerintah daerah terlibat dalam aktivitas paradiplomasi adalah untuk menegaskan kehadiran mereka di panggung global, menarik investasi, meningkatkan otonomi kebijakan, mendorong pertukaran budaya dan ekonomi, dan mengatasi tantangan global bersama. Sejalan dengan beberapa alasan tersebut, Kabupaten Jember telah terlibat dalam kegiatan paradiplomasi sejak 2019 melalui penjajakan-penjajakan yang dilakukan dengan berbagai aktor asing.

Paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember mengarah pada beberapa bidang kerja sama. Takdir Ali Mukti menjelaskan kerja sama daerah dengan pihak asing dapat mencakup bidang kerja sama sosial budaya dan kerja sama ekonomi.<sup>49</sup> Berbagai bidang kerja sama tersebut membuat lapisan pada paradiplomasi yaitu aspek ekonomi (lapisan pertama), aspek budaya, pendidikan, teknologi dan multidimensi lainnya (lapisan kedua), aspek politik (lapisan ketiga).<sup>50</sup>

48 Tavares, *Paradiplomacy Cities and States as Global Players*, 41-47.

49 Mukti, *Politik Paradiplomasi Dan Isu Kedaulatan Di Indonesia*.

50 André Lecours, "Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World," *Netherlands Institute of International Relations*, (Desember 2008):

Paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember sejak tahun 2019 mengacu pada lapisan pertama dan kedua dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah luar negeri maupun organisasi internasional atau aktor non-negara lainnya.

Pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Jember melakukan peninjauan kerja sama dengan Jepang. Kerja sama tersebut berfokus pada bidang pendidikan, UMKM, dan pariwisata dengan rencana kerja sama berupa program pelatihan UMKM hingga belajar di Jepang. Selain itu, terdapat pertukaran destinasi wisata dan study tour.<sup>51</sup> Peninjauan kerja sama antara Kabupaten Jember dengan Jepang ini terjadi pada masa pemerintahan Bupati Jember Faida, dimana terdapat kunjungan dari perwakilan Konsulat Jepang yaitu Tani Masaki pada 19 Maret 2019, di Gedung pertemuan Pendapa Wahyawibawagraha Jember.<sup>52</sup> Hubungan antara Kabupaten Jember dan Jepang diperdekat dengan adanya *Jember Fashion Carnival (JFC)*. Pada bidang pertukaran budaya, JFC menjadi alat yang dapat menjadi branding bagi Kabupaten Jember untuk memperbesar kesempatan kerja sama.

Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 17 September 2019 Kabupaten Jember menjajaki kerja sama dengan Kanada melalui kunjungan perwakilan Kedutaan Besar Kanada di Indonesia, Geoffry Dean.<sup>53</sup> Kerja sama tersebut menargetkan bidang investasi, pembangunan induk kota, pendidikan dan wisata. Adapun program yang direncanakan yaitu adanya program studi di Kanada untuk pelajar dari Jember selama dua minggu

2-4.

51 Laode Muhamad Fathun, "Paradiplomacy in Creating Regional Competitiveness: Case Study of Jember Regency," Indonesian Perspective 6, no. 2 (2021): 166-86.

52 Achmad Syaifuddin, "Terima Kunjungan Konsulat Jepang, Bupati Jember Jajaki Kerjasama," Faktajember, 19 Maret 2019, diakses 25 Oktober 2023, <https://www.faktajember.com/terima-kunjungan-konsulat-jepang-bupati-jember-jajaki-kerjasama/>.

53 Syaifuddin, "Terima Kunjungan Konsulat Jepang."

hingga satu bulan.<sup>54</sup> Kedua kasus yang telah disebutkan, diidentifikasi sebagai bentuk dari *ceremonial paradiplomacy* yang mengacu pada aspek simbolis dan seremonial. Paradiplomasi seremonial menekankan representasi simbolis dari daerah, atau provinsi di panggung global. Merujuk pada penjelasan Tavares, fenomena ini melibatkan kegiatan seperti kunjungan resmi, pertukaran budaya, dan partisipasi dalam acara internasional, di mana pemimpin subnasional memperlihatkan identitas, budaya, dan potensi ekonomi wilayah mereka kepada audiens asing. Secara keseluruhan, paradiplomasi seremonial yang dilakukan oleh Kabupaten Jember memainkan peran penting dalam meningkatkan profil daerah dan membangun hubungan dengan komunitas global, meskipun hanya sampai pada simbolisme dan representasi daripada negosiasi substansial.

Pada tahun 2022 di masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto, Kabupaten Jember melakukan peninjauan dengan salah satu kota di Yunani yaitu kota Thessaloniki. Bentuk paradiplomasi yang direncanakan adalah *Sister City* atau Kota Kembar antara Kabupaten Jember dengan Thessaloniki. Terdapat dokumen yang menawarkan potensi kerja sama dengan Kabupaten Jember oleh Kedutaan Besar Yunani di Indonesia. Rencana *Sister City* dilatar belakangi karena persamaan yang dimiliki Thessaloniki dan Kabupaten Jember seperti memiliki laut, keduanya merupakan kota industri berkebang serta perdagangan. Namun, sejauh ini belum terdapat komunikasi *Government to Government* yang dilakukan oleh Jember-Thessaloniki sehingga membuat kerja sama ini masih berada ditahap peninjauan.<sup>55</sup>

Di samping itu, terdapat paradiplomasi lapisan kedua yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan organisasi

54 Fathun, "Paradiplomacy in Creating Regional Competitiveness: Case Study of Jember Regency," 177.

55 Bidang Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Jember. Wawancara oleh penulis. Jember. 21 Desember 2023.

internasional. Paradiplomasi lapisan kedua berfokus pada aspek kerja sama yang lebih luas seperti pada bidang budaya, teknologi, pendidikan dan lainnya.<sup>56</sup> Dalam studi kasus kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Rutgers WPF, aspek kerja sama yang dilakukan berhubungan dengan aspek sosial dan kesehatan yang menyoroti pengembangan, perlindungan dan promosi hak asasi manusia. Kerja sama tersebut diimplementasikan melalui program Power to Youth yang berfokus pada edukasi HKSR, pada masyarakat di Jember.

### Implementasi Kerja Sama Kabupaten Jember dan Rutgers WPF Melalui Program Power to Youth 2021-2025 dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Jember

*Peran Ruang Temu Generasi Sehat Indonesia (Rutgers Indonesia) dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Jember*

Rutgers WPF Indonesia atau biasa disebut Rutgers Indonesia merupakan mediator dari Rutgers Internasional yang merupakan lembaga internasional non-profit asal Belanda. Awalnya, lembaga ini adalah WPF yang kemudian pada tahun 2010 bergabung dengan Rutgers Nisso dan menjadi Rutgers WPF. Rutgers berupaya meningkatkan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi di Belanda, Eropa, Asia, Afrika dan Amerika Latin. Rutgers WPF Indonesia memiliki misi untuk mendorong kesetaraan gender dan pemenuhan HKSR terutama bagi kaum muda dan remaja di Indonesia. Rutgers Indonesia bekerja melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (PKRS) dan melalui berbagai aksi untuk mencegah Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS).<sup>57</sup> Dalam mencapai misi

mereka, Rutgers Indonesia mengembangkan berbagai program dari tahun ke-tahun yang dapat dilihat pada (Tabel 1) berikut ini:

**Table 1.** Penyebaran Program Rutgers di Indonesia

Periode	Program	Wilayah
2016-2020	Get Up Speak Out (GUSO)	Bandar Lampung, DKI Jakarta, Semarang, Denpasar
2016-2020	Prevention+	Yogyakarta, Lampung, Sukabumi,
2016-2020	Yes I Do	Rembang, Lombok, Barat Bandar Lampung,
2016-2020	Dance4Life	Jakarta Timur, Semarang, Denpasar, Jayapura
2016-2021	SobatASK	Seluruh Indonesia
2017-2020	Explore 4 Action Right Here	Bandar Lampung, Semarang, Denpasar
2021-2025	Right Now 2 (RHRN 2) Gen G	Indonesia
2021-2025	(Generation Gender)	DKI Jakarta, Bandung, Palu
2021-2025	Power to Youth (PtY)	Jawa Tengah (Garut), Jawa Timur (Jember), Nusa Tenggara Barat (Lombok)

Sumber: diolah penulis, dari website Rutgers Indonesia 2024

Pendekatan yang dilakukan Rutgers Indonesia dalam mengimplementasikan program-program kerja tersebut yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan, memberikan pendidikan seksual yang komprehensif termasuk mengembangkan modul pembelajaran, dan mendukung toleransi dan keberagaman. Pendekatan tersebut disalurkan melalui kampanye, pendidikan publik, studi penelitian dan memberikan dukungan kepada PTY, E4A 12-14 November 2023,” (Oktober 2023).

56 Anak Agung Mia Intenilia dan A. A. B. N. A. Surya Putra, “From Local to Global: Examining Sister City Cooperation as Paradiplomacy Practice in Denpasar City, Bali, Indonesia,” *Jurnal Bina Praja* 13, no. 2 (2021): 357-67.

57 Rutgers Indonesia, “Kerangka Acuan Kegiatan Dialog Capaian Perubahan Dari Program RHRN 2, GEN-G,

pemerintah untuk menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat, terutama perempuan, remaja, anak-anak dan kelompok minoritas.

Merujuk pada Teuku May Rudy, organisasi internasional memiliki tiga peran yakni; 1) Forum untuk melakukan kerja sama dan mencegah terjadinya konflik (antar anggota); 2) Sebagai wadah untuk melakukan perundingan dan pengambilan keputusan bersama yang saling menguntungkan, serta; 3) Lembaga independen dalam melaksanakan kegiatan seperti kegiatan sosial kemanusiaan, *peace keeping operation*, pelestarian lingkungan hidup dan lain-lain.<sup>58</sup> Rutgers WPF memiliki peranan sebagai lembaga independen dalam melaksanakan kegiatan sosial pada aspek kesetaraan gender. Disamping itu, Rutgers Indonesia memiliki peran sebagai advokat. Utami dan Amin menyebut organisasi internasional dapat memberikan pengaruh pada pembuat kebijakan, mereka dapat berfungsi sebagai advokat untuk mempengaruhi undang-undang yang ada serta memperkuat penerapan hukum.<sup>59</sup> Pendekatan hukum yang dilakukan oleh Rutgers Indonesia bertujuan untuk mendorong adaptasi, pengembangan dan penegakan hukum terkait dengan pemenuhan HKSR dan Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS).<sup>60</sup>

Sebagai organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak pada bidang sosial dan kesehatan, Rutgers WPF telah membantu mengatasi masalah ketimpangan gender yang terjadi di Jember sejak tahun 2021. Rutgers WPF dapat membantu masalah sosial yang ada di Jember dikarenakan sebagai organisasi internasional Rutgers WPF memiliki sumber daya manusia, keuangan, pengalaman serta keahlian. Sumber daya material yang

58 Teuku May Rudy, *Administrasi & Organisasi Internasional*, ed. Aep Gunarsa, Kedua (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), 27-28.

59 Utami dan Amin, "Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju," 72.

60 Rutgers Indonesia, *Rutgers Indonesia Siapa Kami?*, n.d.

dimiliki oleh INGOs seperti Rutgers WPF dapat digunakan untuk membantu daerah, terutama ketika daerah memiliki keterbatasan dalam menghadapi permasalahan di masyarakat. Menurut Jackson dan Sorensen, organisasi internasional merupakan aktor yang kuat karena mereka merupakan birokrasi dan membawa tujuan sosial liberal yang dipandang luas, diidamkan oleh masyarakat dan sah.<sup>61</sup> Dengan demikian, melalui kerja sama dengan organisasi internasional, daerah dapat mendapatkan dukungan tambahan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka.

#### *Implementasi Paradiplomasi Kabupaten Jember dan Rutgers WPF Indonesia Melalui Program Power to Youth 2021-2023*

Kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Rutgers WPF pada dasarnya telah dimulai pada tahun 2021. Kerja sama yang terjalin masuk pada jenis Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (KSDLL) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 yang mengarah pada lapis kedua pada aspek kerja sama sosial dan kesehatan. Di samping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 30 menyebut Lembaga Non-Profit yang bekerja sama dengan pemerintah daerah di Indonesia harus memiliki izin operasional. Rutgers WPF merupakan lembaga yang memiliki legalitas di Indonesia melalui cabangnya yakni Rutgers Indonesia yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1997. Sejalan dengan regulasi yang berlaku, dalam melakukan kerja sama dengan Rutgers Indonesia terdapat proses dan tahapan yang cukup panjang yang akan disusun sebagai berikut.

61 Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Kelima (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2013), 384.



Sumber: diolah penulis dari hasil wawancara dengan berbagai pihak  
 Gambar 2: Proses Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers WPF

Tahap pertama, dalam menetapkan Kabupaten Jember sebagai “*Pilot Project*” program *Power to Youth*, Rutgers WPF Indonesia meminta rekomendasi dari nasional dan provinsi.<sup>62</sup> Di samping itu, agar program yang direncanakan dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran, Rutgers Indonesia juga melakukan riset yang bertujuan untuk mengetahui kondisi di lingkungan masyarakat terkait pernikahan anak di Jember. Tingkat pernikahan anak di Jember sangatlah tinggi yang dimana pada tahun 2020, berada pada peringkat 2 nasional dengan 1.451 kasus dispensasi perkawinan usia anak yang disetujui.<sup>63</sup> Tahap pertama ini merupakan tahapan yang biasa disebut sebagai penjajakan, yaitu dengan melakukan observasi potensi kegiatan kerja sama yang akan dilaksanakan.

Tahap kedua, adalah pengajuan rencana kegiatan tahunan. Tahapan ini termasuk pada persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 30 yang mengharuskan adanya susunan rencana kegiatan tahunan. Sebelum mencapai kesepakatan melalui penandatanganan MoU, Pemerintah Kabupaten Jember melakukan diskusi dan perundingan terkait program

kerja tahunan, sasaran serta tujuan yang dikerjakan samakan dengan Rutgers WPF. Setelah program kerja tahunan disepakati, proses kerja sama dapat berlanjut ke tahap berikutnya yaitu persetujuan.

Tahap ketiga, yaitu persetujuan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Jember menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Rutgers WPF mengenai Pencegahan Perkawinan Anak.<sup>64</sup> MoU tersebut ditandatangani pada 11 Oktober 2022, oleh Bupati Kabupaten Jember yaitu Hendy Siswanto yang bertindak sebagai kepala daerah. Mukti menyebut dalam prinsip paradiplomasi di Indonesia, kepala daerah memiliki peran sebagai perwakilan daerah dalam menandatangani kerja sama dengan lembaga atau pihak asing.<sup>65</sup> Dengan diperkuatnya kerja sama melalui MoU, maka penanganan masalah ketimpangan gender dapat terakselerasi dengan baik melalui program *Power to Youth*.

Program *Power to Youth* merupakan program Rutgers Internasional yang dijalankan

62 Jember Today, “Kerja Sama Dengan Rutgers Indonesia Perkuat Penanganan Masalah Perempuan,” Jember Today, 11 Oktober 2022, diakses 22 Januari 2024, <https://jembertoday.net/kerja-sama-dengan-rutgers-indonesia-perkuat-penanganan-masalah-perempuan/>.

63 Wahyunik dan Rachmawati, “Tingginya Perkawinan Anak Jadi Faktor Jember ‘Pilot Project’ *Power to Youth*, Bakal Berjalan 5 Tahun.”

64 Maulana Ijal, “Pemkab Jember Bersama Rutgers Komitmen Cegah Perkawinan Anak,” Jawa Pos, 11 Oktober 2022, diakses 22 Januari 2024, <https://radarjember-jawapos-com.cdn.ampproject.org/v/s/radarjember.jawapos.com/pemerintahan/amp/791119575/pemkab-jember-bersama-rutgers-komitmen-cegah-perkawinan-anak?>

65 Mukti, *Politik Paradiplomasi Dan Isu Kedaulatan Di Indonesia*, 70.

di dua negara yakni Indonesia dan Ghana.<sup>66</sup> Di Indonesia, program Power to Youth yang dilaksanakan di Kabupaten Jember dimulai sejak tahun 2021 dan direncanakan akan berjalan hingga tahun 2025. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 32 yang mengatur jangka waktu pelaksanaan kerja sama daerah dengan lembaga diluar negeri, paling lama dilaksanakan selama lima tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Selama program berjalan terdapat pembaharuan MoU yang dilakukan setiap tahun.<sup>67</sup> Pada tanggal 15 Desember 2023 program Power to Youth 2023 ditutup dan pada bulan Januari 2024 akan dilaksanakan kegiatan Power to Youth yang baru serta menandakan tahun keempat program ini berjalan.

Adapun peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam kerja sama ini adalah melakukan pemantauan dan pengawasan pada pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember juga berpartisipasi dalam program Power to Youth dengan mengarahkan perangkat daerah yang berhubungan dengan fokus kerja sama tersebut. Setelah MoU ditandatangani, Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan surat perintah khusus kepada dinas-dinas atau perangkat daerah terkait untuk melakukan pengawasan dan mengawal kerja sama tersebut. Perangkat daerah yang ditunjuk dan bertugas untuk membantu jalannya program Power to Youth antara lain adalah; 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember; 2) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jember; dan 5)

66 Rutgers International, "Power to You(Th)," Rutgers International, 2024, diakses 22 Januari 2024, <https://rutgers.international/programmes/power-to-youth/>.

67 Bappeda Kabupaten Jember. 2023. Wawancara oleh penulis. Jember. 30 November 2023.

Kementerian Agama Kabupaten Jember.<sup>68</sup>

Di samping itu Rutgers WPF sebagai inisiator kerja sama program Power to Youth melaksanakan peran dan fungsinya dengan memperkuat orang muda, pemangku kepentingan termasuk pembuat kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam mencapai cita-cita mendorong pemenuhan HKSR dan kehidupan yang lebih adil gender dan inklusif di Jember. Beberapa strategi utama dalam menjalankan program Power to Youth telah dilaksanakan, diantaranya meliputi Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (PKRS) di sekolah menengah umum, memperkuat/pemberdayaan orang muda, literasi hak-hak terutama hak perempuan, anak dan kesehatan seksual dan reproduksi, kampanye untuk meningkatkan dukungan pada perubahan, serta advokasi kebijakan dari unit desa hingga nasional.

Rutgers WPF dalam kerja sama ini berperan sebagai *socialization*, melalui pendidikan dan penyuluhan, Rutgers WPF memberikan informasi dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi kepada masyarakat, termasuk mengenai kehamilan yang sehat, kontrasepsi, pencegahan penyakit menular seksual, dan hak reproduksi. Edukasi dan sosialisasi dilakukan di sekolah yang terletak di dua kecamatan dan empat desa yaitu; (1) Kecamatan Ledokombo di Desa Sukogidri dan Lembengan; (2) Kecamatan Silo di Desa Karangharjo dan Harjomulyo. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan kondisi angka pernikahan anak yang tinggi di dua kecamatan tersebut. Adapun sekolah-sekolah yang menjadi sasaran edukasi dan penyuluhan adalah SMPN 1 Ledokombo, SMP Al-Falah, MTs Nurul Manan, MTs Tarbiyatul ihsan, SMPN 1 Silo, dan SMPN 3 Ledokombo.

Rutgers WPF juga berperan dalam advokasi dan pemyarakatan. Rutgers

68 Rutgers Indonesia, "Kerangka Acuan Kegiatan Dialog Capaian Perubahan Dari Program RHRN 2, GEN-G, PTY, E4A 12-14 November 2023."

WPF memperjuangkan hak-hak reproduksi, kesetaraan gender, dan akses universal terhadap layanan kesehatan reproduksi melalui advokasi publik, partisipasi dalam kebijakan, dan kerja sama dengan pemerintah dan mitra masyarakat sipil. Pendekatan hukum yang dilakukan oleh Rutgers Indonesia bertujuan untuk mendorong adaptasi, pengembangan dan penegakan hukum terkait dengan pemenuhan HKSR dan Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS).<sup>69</sup> Selama tiga tahun program Power to Youth (PtY) berjalan (2021-2023) telah berhasil mendorong lahirnya Peraturan Desa didukung dengan komitmen di desa yang meningkat.<sup>70</sup>

Kemudian untuk mendukung jalannya program yang dikerjasamakan, Rutgers Indonesia melakukan pendekatan dengan memberikan dukungan dana hibah. Kepentingan daerah dalam mengatasi isu kesetaraan gender tidak akan tercapai jika tidak ada dukungan penganggaran yang cukup. Oleh sebab itu, Rutgers WPF memberikan dukungan dana hibah dengan tujuan untuk memfasilitasi pembelajaran, kapasitas dan kekuatan antara mitra organisasi. Melalui Kementerian Luar Negeri Belanda, terdapat dana yang dihibahkan oleh pemerintah Belanda yang disalurkan melalui Rutgers Indonesia, sebesar 4,3 miliar selama periode tiga tahun dari 2021 hingga 2023.<sup>71</sup> Dana tersebut menjadi salah satu pendukung penting dalam menjalankan program Rutgers Indonesia untuk kemajuan perempuan muda, dan anak-anak di Kabupaten Jember.

Power to Youth merupakan program yang bertujuan untuk mendorong RPPM agar berdaya dalam bernegosiasi dan menyuarakan

hak-hak mereka di ruang publik. Selain itu tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan perempuan yang mandiri dalam mengambil keputusan untuk dirinya dan dapat melindungi dirinya dari segala bentuk kekerasan dan praktik-praktik berbahaya yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi seperti kehamilan remaja, perkawinan anak, sunat perempuan dan masih banyak lagi. Program Power to Youth memiliki fokus utama yaitu pencegahan perkawinan anak, kehamilan remaja dan kekerasan berbasis gender dan seksual. Terdapat 4 jalur (pathways) sasaran perubahan yang ingin dicapai dalam program Power to Youth yaitu sebagai berikut:

1. Kaum Muda (12-24 Tahun). Hasil yang diharapkan yakni kaum muda dapat menuntut akuntabilitas dan daya tanggap terhadap praktik berbahaya, Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS) dan kehamilan remaja.
2. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). OMS dapat memperkuat suara anak muda untuk melindungi, mengklaim, dan memperluas ruang sipil.
3. Aktor Sosial atau Aktor Masyarakat. Aktor masyarakat dapat mendorong dan mendukung hak-hak pemuda dan norma sosial progresif.
4. Aktor Negara. Negara berperan penting sebagai pembuat kebijakan, memberi anggaran, dan penerapan tentang praktik-praktik yang merugikan, Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS) serta kehamilan yang tidak diinginkan.

Untuk mencapai tujuan perubahan di atas, program Power to Youth bekerja untuk memperkuat dan menjangkau remaja serta orang muda di sekolah dan komunitas. Pada praktiknya, program Power to Youth juga bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yakni Yayasan Tanoker Ledokombo. OMS dapat membantu

69 Rutgers Indonesia. n.d. Rutgers Indonesia Siapa Kami?.

70 Project Manager PtY Tanoker. 2023. Wawancara oleh penulis. Jember. 18 Desember 2023.

71 Jember Today, "Rutgers Indonesia Bawa Dana Hibah 4,3 M Dari Belanda Ke Jember, Untuk Siapa?," Jember Today, 11 Oktober 2022, diakses 22 Januari 2024, <https://jembertoday.net/rutgers-indonesia-bawa-dana-hibah-43-m-dari-belanda-ke-jember-untuk-siapa/>.

dalam memperkuat suara anak muda untuk mengklaim, melindungi, dan memperluas ruang sipil. Di samping itu, media juga menjadi partner penting dalam memberikan kontribusi terintegrasi kepada empat jalur yang sudah disebutkan di atas. Oleh karena itu, Rutgers-Tanoker Ledokombo juga melakukan penandatanganan MoU kerja sama dengan RRI Jember pada tanggal 27 Juni 2023.<sup>72</sup> Kerja sama dengan RRI Jember bertujuan untuk menyebarkan informasi positif terkait kegiatan yang dilaksanakan dalam program Power to Youth. Selain itu, terdapat pelatihan-pelatihan yang diperuntukkan bagi wartawan agar mereka memiliki sertifikasi dan lebih peka terhadap isu kesetaraan gender.

Kerja sama yang diimplementasikan melalui program Power to Youth selama tiga tahun terakhir telah memberikan dampak yang positif seperti terdapat peningkatan kapasitas dari anak-anak di dalam Forum Anak Desa (FAD) yang ada di desa Karangharjo, Harjomulyo, Lembengan, dan Sukogidrih. Di sisi lain hasil dari kerja sama tersebut juga mendorong lahirnya Peraturan Desa didukung dengan komitmen di desa yang meningkat, dan meningkatnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan organ wanita di sekolah-sekolah. Artinya, masyarakat Kabupaten Jember mulai terbuka dan mulai mempertanyakan budaya-budaya yang menjadi pemicu perkawinan anak. Dengan adanya edukasi tentang kesehatan reproduksi, masyarakat dapat menunda pernikahan hingga usia ideal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terakhir, dengan adanya dialog mengenai permasalahan kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, dan kesehatan reproduksi yang diangkat ke ruang publik, masyarakat mulai menganggap permasalahan tersebut bukan lagi hal yang tabu untuk didiskusikan.

<sup>72</sup> Inor Ps, "MOU Tanoker - Rutgers - RRI Jember," Tanoker, 30 Juni 2023, diakses 23 Januari 2024, <https://tanoker.org/mou-tanoker-rutgers-rri-jember/>.

## Kesimpulan

Kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers WPF menunjukkan keberhasilan yang dibuktikan dengan adanya peningkatan kapasitas dari anak-anak di dalam Forum Anak Desa (FAD), komitmen di desa meningkat, dan terdapat edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan organ wanita di sekolah-sekolah. Kerja sama antara pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers Indonesia telah memasuki tahun ke-empat yang menjadi bukti komitmen kedua pihak dalam mengatasi kasus kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi yang ada di Jember. Di sisi lain, implementasi kerja sama tersebut berjalan dengan baik dan telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendorong kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi di Kabupaten Jember. Hal ini didukung oleh kerja sama pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers Indonesia bersama mitra lainnya yang memiliki hubungan timbal balik yang sejalan selama proses pelaksanaan dan pengawasan.

Kerja sama dalam skema paradiplomasi KSDLL berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa tahapan kerja sama yakni peninjauan, pengajuan rencana kegiatan tahunan, persetujuan pemerintah daerah, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan pengawasan. Kerja sama yang dilakukan tergolong pada paradiplomasi lapisan kedua pada bidang sosial dan kesehatan. Berbeda dengan paradiplomasi yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan Kanada dan Jepang yang bersifat seremonial, paradiplomasi yang dilakukan dengan Rutgers WPF mengacu pada fenomena global paradiplomacy yang disebut Tavares sebagai interaksi pemerintah daerah dan organisasi internasional dalam isu global. Dengan melihat hasil temuan, paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers WPF dinilai berhasil dalam

membantu mendorong kesetaraan gender di Jember. Rutgers WPF sebagai organisasi internasional non-pemerintah dapat menjadi partner paradiplomasi yang efektif bagi pemerintah daerah untuk menangani kasus sosial dan kesehatan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Nur, Mohammad Rezal, dan Labandingi Latoki. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 1 (2022): 19-48.
- Agusalim, Lestari, Sulistiyowati, dan Shifa Nur Amalia. *Gender Dan Pembangunan Ekonomi: Studi Lintas Provinsi Di Indonesia*. Bogor: Madza Media, 2023.
- Badan Pusat Statistik. *Kajian Perhitungan Indeks Ketimpangan Gender 2022*. BPS RI, 2022.
- Badan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Jember. 2023. Wawancara oleh penulis. Jember. 21 Desember 2023.
- Bappeda Kabupaten Jember. 2023. Wawancara oleh penulis. Jember. 30 November 2023.
- BPS. "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2022." *BADAN PUSAT STATISTIK*, 2022. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/08/01/2042/indeks-ketimpangan-gender-ikg-2022.html>.
- BPS Provinsi Jawa Timur. "Indeks Ketimpangan Gender (IKG), 2018-2022," BPS, 1 Agustus 2023. Diakses 20 Januari 2024. <https://jatim.beta.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjA3IzI=/indeks-ketimpangan-gender-ikg.html>.
- Cassidy, Jennifer A. *Gender and Diplomacy*. Routledge New Diplomacy Studies, 2017.
- Center for Gender and Sexuality Studies, University of Indonesia. "Power To You ( Th ) - Indonesia Young People ' S Perspectives and Decision Making Regarding Harmful Practices , Violence Against Women," KIT Royal Tropical Institute, 2021.
- Chen, Zefanya Angellin, Vanessa Vanessa, dan Felicia Amanda Sulistio. "Case Studies on Marriage for Children Who Have Not Reached the Age Limit." *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2023): 1167-74.
- Effendi, Tonny Dian. "Ideational Factors in the Paradiplomacy Activities of Indonesian Cities." *Journal of Global and Area Studies* 6, no. 3 (2022): 241-68.
- Fathun, Laode Muhamad. "Paradiplomacy in Creating Regional Competitiveness: Case Study of Jember Regency." *Indonesian Perspective* 6, no. 2 (2021): 166-86.
- . "The Role of Paradiplomacy and the Potential Proto-Diplomacy in the Unitary State" 6, no. 2 (2022): 298-319.
- Halim, Daniel, Sean Hambali, dan Ririn Salwa Purnamasari. "Not All That It Seems: Narrowing of Gender Gaps in Employment during the Onset of COVID-19 in Indonesia," 2023.
- Hasudungan, Anju Nofarof. "Increasing Child Marriage in Indonesia during the Covid-19 Pandemic: What Causes It?" 2, no. 2 (2022): 151-61.
- Hubert, Ignatius, dan Windy Dermawan. "West Jakarta Government's Paradiplomacy towards Global Public in

- Kalideres Refugee Issues.” *Society* 8, no. 2 (2020): 567–80.
- Intentilia, Anak Agung Mia, dan A. A. B. N. A. Surya Putra. “From Local to Global: Examining Sister City Cooperation as Paradiplomacy Practice in Denpasar City, Bali, Indonesia.” *Jurnal Bina Praja* 13, no. 2 (2021): 357–67.
- Irfani, Fahmi. “Konstektualisasi Gender Islam Dan Budaya.” *Buletin AL-Turas* 16, no. 1 (2018): 200–216.
- Jackson, Robert, dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Kelima. PUSTAKA PELAJAR, 2013.
- Jember Today. “Rutgers Indonesia Bawa Dana Hibah 4,3 M Dari Belanda Ke Jember, Untuk Siapa?.” *Jember Today*, 11 Oktober 2022. Diakses 22 Januari 2024. <https://jembertoday.net/rutgers-indonesia-bawa-dana-hibah-43-m-dari-belanda-ke-jember-untuk-siapa/>.
- Jember Today. “Kerja Sama dengan Rutgers Indonesia Perkuat Penanganan Masalah Perempuan.” *Jember Today*, 11 Oktober 2022. Diakses 22 Januari 2024. <https://jembertoday.net/kerja-sama-dengan-rutgers-indonesia-perkuat-penanganan-masalah-perempuan/>.
- Khalil, Samera A. “Addressing Gender Inequalities with AI-Driven Policies in Developing Countries,” (2023).
- Khan, Ahmad, dan Melanie M. Tidman. “Gender Inequality in Developing Countries: A Multifactorial Review.” *Journal of Social and Political Sciences* 6, no. 1 (2023): 151–62.
- Kuznetsov, Alexander S. *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. London ; New York, NY: Routledge, 2015.
- Lecours, André. “Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World,” *Netherlands Institute of International Relations*, (Desember 2008).
- Liputan6. 2022. “Urus Pemkab Jember Cegah Pernikahan Dini Hingga Eksploitasi Anak.” *Liputan6*, 22 Maret 2022. Diakses 20 Januari 2024, <https://www.liputan6.com/jatim/read/4918526/jurus-pemkab-jember-cegah-pernikahan-dini-hingga-eksploitasi-anak>
- Mansbach, Richard W, dan Kirsten L Rafferty. *Pengantar Politik Global*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012.
- Maulana Ijal, “Pemkab Jember Bersama Rutgers Komitmen Cegah Perkawinan Anak,” *Jawa Pos*, 11 Oktober 2022. Diakses 22 Januari 2024. [https://radarjember-jawapos-com.cdn.ampproject.org/v/s/radarjember.jawapos.com/pemerintahan/amp/791119575/pemkab-jember-bersama-rutgers-komitmen-cegah-perkawinan-anak?](https://radarjember-jawapos-com.cdn.ampproject.org/v/s/radarjember.jawapos.com/pemerintahan/amp/791119575/pemkab-jember-bersama-rutgers-komitmen-cegah-perkawinan-anak?amp_hq)
- Mosakova, E.A. “Era of Covid-19: How the Pandemic Affected Gender Inequality and Fertility (on the Example of BRICS).” *RUDN JOURNAL OF SOCIOLOGY* 23, no. 2 (2023): 284 – 293.
- Mukti, Takdir Ali. *Politik Paradiplomasi Dan Isu Kedaulatan Di Indonesia*, Yogyakarta: The Phinisi Press, 2020.
- Musawar, M Riadhussyah, Ahmad Saifuddin Bukhari, dan Alwafi Ridho Subarkah. “Prevent Child Marriage by Improving Education in West Nusa Tenggara Through Sister Province Relations with Kujawsko-Pomorskie, Poland” 6, no. 1 (2022): 36–55.
- Nadejda, dan Lanioglo. “To the Issue of Increasing Gender Inequality in the Socio-Economic Consequences of the

- COVID-19 Pandemic,” 2023.
- Nastiti, Nala Nourma, dan I Wayan Aditya Harikesa. “Fenomena Penyebaran Pandemi Covid 19 Dan Kesenjangan Gender Di Asia Tenggara (Studi Kasus: Dampak Covid 19 Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia (2020-2021).” *Jurnal Dinamika Global* 8, no. 01 (2023): 109–32.
- Olarewaju, Tolulope, dan Julia Fernando. “Gender Inequality and Female Entrepreneurship in Developing Countries,” 2020.
- Project Manager PtY Tanoker. 2023. Wawancara oleh penulis. Jember. 18 Desember 2023.
- Ps, Inor. “MOU Tanoker – Rutgers – RRI Jember.” Tanoker, 30 Juni 2023. Diakses 23 Januari 2024. <https://tanoker.org/mou-tanoker-rutgers-rri-jember/>.
- Radar Digital. “Perda KLA Disahkan Juni Lalu, Hingga Kini Belum Ada Aturan Turunan Untuk Cegah PUA Di Jember.” *Radar Jember*, 25 Oktober 2023. Diakses 22 Januari 2024. <https://radarjember.jawapos.com/jember/793108813/perda-kla-disahkan-juni-lalu-hingga-kini-belum-ada-aturan-turunan-untuk-cegahpuadi-jember>.
- Rahmayanty, Dinny, Novitri Wulandari, M. Reza Pratama, dan Natalia Putri. “Ketidaksetaraan Gender Dalam Sistem Patrilineal.” *Natalia Putri INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 6513–22.
- Rudic, Olga. “The Advancement of Gender Equality Policies in Developing Countries on the Background of Current Global Challenge.” 2, no. 163 (2023): 255–60.
- Rudy, Teuku May. *Administrasi & Organisasi Internasional*. Edited by Aep Gunarsa. Kedua. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Rutgers International. “Power to You(Th).” Rutgers International, 2024. Diakses 22 Januari 2024. <https://rutgers.international/programmes/power-to-youth/>.
- Suparno, Indriyati, dan Rahayu Purwaningsih. *Modul Serial Pendidikan Gender, Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Orang Muda-Untuk Pusat Layanan Komunitas (PLK)*. Yayasan SAPA (SAPA Institut), 2022.
- Syaifuddin, Achmad. “Terima Kunjungan Konsulat Jepang, Bupati Jember Jajaki Kerjasama.” *Faktajember*, 19 Maret 2019. Diakses 25 Oktober 2024. <https://www.faktajember.com/terima-kunjungan-konsulat-jepang-bupati-jember-jajaki-kerjasama/>.
- Rodrigo Tavares, *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. New York: Oxford University Press, 2016.
- UN. “Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls.” United Nations, 2024. Diakses 15 Januari 2024. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>.
- UNFPA. “Frequently Asked Questions about Gender Equality,” United Nations Population Fund, 2024. Diakses 19 Maret 2024. <https://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about-gender-equality#:~:text=Achieving gender equality requires women's,in productive and reproductive life>.
- UNICEF, “Glossary Of Terms And Concepts.” UNICEF Regional Office for South Asia (November 2017): 537–58.
- Utami, Andi Nur Fiqhi, dan Asma Amin.

“Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju,” *Journal of Government and Politics (JGOP)* 5, no. 1 (Juli 2023): 70-74.

Wahyunik, Sri, dan Arie Noer Rachmawati. “Tingginya Perkawinan Anak Jadi Faktor Jember ‘Pilot Project’ Power to Youth, Bakal Berjalan 5 Tahun.” *Tribun Jember*, 12 Oktober 2022. Diakses 22 Januari 2024. <https://jatim.tribunnews.com/2022/10/12/tingginya-perkawinan-anak-jadi-faktor-jember-pilot-project-power-to-youth-bakal-berjalan-5-tahun>.

Widiharto, Chr. Argo, Farikha Wahyu Lestari, dan Suhendri Suhendri. “Edukasi Tentang Pernikahan Dini Dari Perspektif Psikososial, Budaya Dan Kesehatan Reproduksi.” *Altruis: Journal of Community Services* 3, no. 3 (2022): 60-63.